BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah adanya listrik di Indonesia dimulai pada abad ke-19, pada saat itu penguasaan dan perusahaan listrik (kelistrikan) di Indonesia dipegang dan diselenggarakan secara monopoli oleh perusahaan-perusahaan Belanda.

1. Masa Penjajahan Belanda

   Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (*gemente*) maupun swasta atau sumbangan antara pihak pemerintah dan swasta.

   Di Jawa Barat khususnya kota Bandung, peruahaan yang mengelola penyediaan listrik untuk kepentingan umum yaitu *Bandungsche Electriciet Maarschaappij* (BEM) yang bertujuan untuk membangun jaringan listrik yang berdiri tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan *Gemeenschappelijk Electricitiet Voor Bandoeng* (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan kata pendirian Notaris *Mr. Adriaan Hendrik Van Ophuisen* No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sa* dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Jawa.

3. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Saat ini

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjalani periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan kemerdekaan RI dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak itu perusahaan listrik dikuasai oleh bangsa Indonesia dan diganti namanya menjadi "Djawatan Listrik" yang berdomisili di Jawa Barat.

Pada 27 Desember 1957 GEBEO di Bandung diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda ang dikenakan nasionalisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.19 tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan aturan dengan peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Listrik Negara (BPUPLN), lalu istilah PLN Bandung diubah menjadi PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan/wadah BPUPLN di Jawa Barat, dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik

Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja daerah.

Berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI No. 05/DII/Sek/1975 tanggal 17 Juli PLN Eksploitasi XII diubah namanya menjadi "Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat". Karena kebutuhan akan listrik semakin meningkat, PLN memerlukan dana yang cukup besar. Kebutuhan dana tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PLN dan pemerintah, maka dari itu untuk mendapatkan dana tersebut PLN dan pemerintah memutuskan untuk meminjam dari luar/swasta maka berubahlah status Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dari PERUM manjadi PT sesuai dengan peratuan pemerintah No. 23 tahun 1994 dengan sebutan "PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat" sejak 30 Juli 1994.

Visi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1. Mempertahankan posisi sebagai market leader
2. Mewujudkan perusahaan setara sekelas dunia
3. Sumber daya manusia profesionalisme
4. Aktivitas usaha akrab di lingkungan

Misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1. Memberikan kontribusi dalam pembayaran nasional

2. Melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat
3. Memperhatikan kepentingan *stakeholdersI*
4. Menjaga kualitas produk
5. Memuaskan pelanggan

Moto PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah:

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Penerapan nilai-nilai:

1. Saling percaya
2. Integritas
3. Peduli
4. Pembelajar

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang merupakan pemegang kuasa ketenagalistrikan dan mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan yang baik serta memberikan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik, masih ada pelayanan lain yang diberikan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten kepada konsumen yaitu perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik yang disalurkan juga penambahan daya serta sambungan sementara.

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai fungsi pendistribusian dan pengusahaan ketenagalistrikan sesuai dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi pendistribusian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik
2. Pengoprasian dan pemeliharaan system pendistribusian tenaga listrik
3. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan
4. Pengelolaan sumber daya manusia
5. Pengawasan pelaksanaan distribusi

Adapun cabang-cabang/unit PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut

1. Cabang Cirebon
2. Cabang Tasikmalaya
3. Cabang Garut
4. Cabang Sukabumi
5. Cabang Bogor

6. Cabang Banten
7. Cabang Purwakarta
8. Cabang Cimahi
9. Cabang Bandung
10. Cabang Cianjur
11. Cabang Majalaya
12. Cabang Bekasi
13. Cabang Depok
14. APD
15. Cabang Sumedang
16. Cabang Karawang

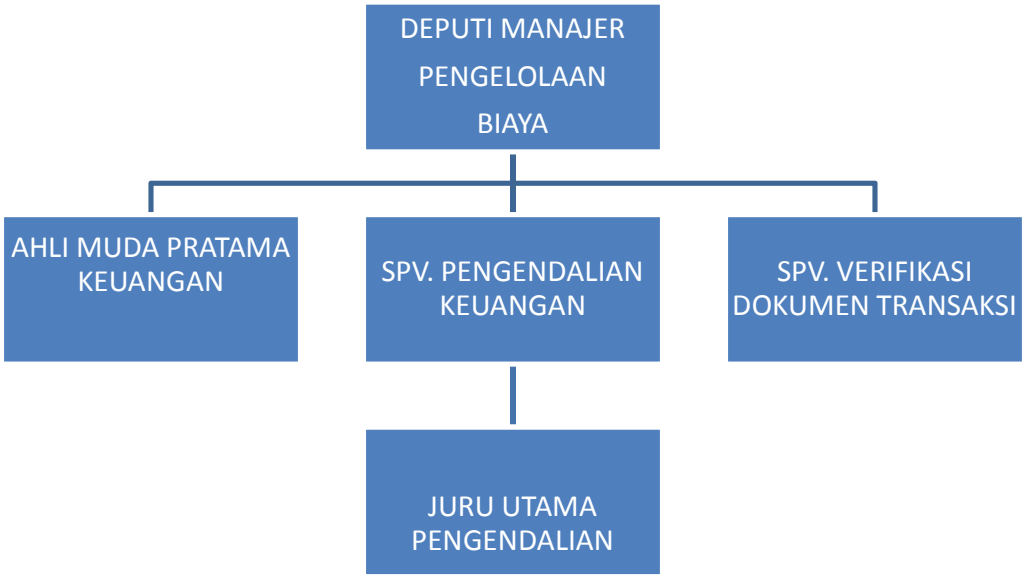
2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ditetapkan melalui surat keputusan General Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten No. 101.K/021/GM.DJBB/2004. Stuktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan struktur organisasi fungsional dan staf yang terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan unsur pengawasan yaitu auditor internal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan yang merupakan pejabat tertinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Secara garis besar struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan adalah General Manajer
2. Unsur pembantu pimpinan, yaitu:
    a. Manajer Perencanaan
    b. Manajer Niaga
    c. Manajer Distribusi
    d. Manajer Keuangan
    e. Manajer Sumber Daya Manusia
    f. Manajer Komunikasi, Hukum, dan Administrasi
3. Unsur pengawasan adalah auditor internal

Untuk lebih jelasnya mengenai garis besar struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten struktur organisasi yang lengkap dapat dilihat pada lembar lampiran, sedangkan struktur organisasi bagian pengelolaan biaya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Bantendapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: bagian keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Deputi Manajer Pengelolaan Biaya

Deputi Manajer Pengelolaan Biaya bertanggung jawab dan mengawasi semua kegiatan yang ada di Bagian Pengelolaan Biaya pada Bidang Keuangan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Selain itu juga Deputi Manajer Pengelolaan Biaya bertugas dalam penandatanganan cek dan giro.

2. Supervisor Pengendalian Keuangan

Tugas Pokok:

a. Memeriksa bukti bank penerimaan dan pengeluaran dan meneliti kebenaran pencantuman pos anggaran dan kode akuntansi
b. Membuat/mengisi giro bilyet dan cek
c. Mencatat transaksi harian bank penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku bank pembantu (*Extracomtabel)*
d. Memeriksa dan meneliti kebenaran laporan bulanan *cash flow* kantor Distribusi dan laporan realisasi kartu anggaran
e. Mencocokan daftar pungutan pajak dengan potongan pajak pada buku bank pembantu
f. Memonitor/mengawasi penyetoran dan pelaporan pajak
g. Memeriksa dan memonitor laporan pajak triwulan kantor Distribusi dan gabungan
h. Membuat daftar rekonsiliasi bank antara buku bank PLN dengan rekening Koran
i. Memonitor permohonan dropping uang ke PLN pusat sesuai *cash budget* dan PT tambahan

j. Memonitor dan mengevaluasi dropping dropping uang ke APJ/APD sesuai dengan *cashbudget* dan PA tambahan

k. Bekerja sama dan saling membantu antar pegawai serta koordinasi dengan bidang terkait.

3. Supervisor Verifikasi Dokumen Transaksi

Tugas Pokok:

a. Pengambilan dan penyetoran uang ke bank

b. Verifikasi berkas tagihan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai syarat-syarat pembayaran yang berlaku

c. Membuat bukti bank penerimaan dan pengeluaran sebagai transaksi harian bank (*dummy*) baik bank operasi maupun bank *receipt*

d. Membuat surat pemindahbukuan ke bank untuk membayar kepada pihak ke-3, dropping AO & AI ke APJ/APD

e. Memeriksa bukti bank penerimaan dan pengeluaran serta meneliti kebenaran pencantuman pos anggaran dank ode akuntansi

f. Pengisian amplop pensiunan dan pembayaran manfaat pension

g. Bekerja sama dan saling membantu antar pegawai serta berkoordinasi dengan bidang terkait.

4. Ahli Muda Pratama KeuanganTugas Pokok:

    a. Pengambilan dan penyetoran uang ke bank

    b. Membuat bukti bank penerimaan dan pengeluaran sebagai transaksi harian bank (*dummy*) baik untuk bank operasi maupun bank *receipt*

    c. Mengaktualkan transaksi harian penerimaan dan pengeluaran untuk bahan laporan *cash flow*

    d. Pengisian amplop pensiunan dan pembayaran manfaat pension

    e. Membuat laporan bulanan *cash flow* kantor Distribusi

    f. Membuat dan menyusun laporan bulanan realisasi kartu anggaran

    g. Membuat dan menyusun daftar titipan sementara bulanan untuk bahan setoran ke rekening *receipt* bagian pendapatan

    h. Menyusun daftar pungutan pajak dengan potongan pajak pada buku bank pembantu *extracomptabel*

    i. Bekerja sama dan saling membantu antar pegawai serta berkoordinasi dengan bidang terkait.

5. Juru Utama Pengendalian Keuangan

    Tugas Pokok:

    a. Pengambilan dan penyetoran uang ke bank

b. Membuat bukti bank penerimaan dan pengeluaran sebagai transaksi harian bank (*dummy)* baik untuk bank operasi maupun *receipt*

c. Pengisian amplop pensiunan dan pembayaran manfaat pensiunan

d. Membuat laporan persekot dinas dan membuat surat pemberitahuan tunggakan persekot dinas

e. Menerima dan membayarkan uang

f. Membuat laporan PUMP KPR dan BPRP untuk Kantor Distribusi dan gabungan

g. Menbuat rekonsiliasi PUMP KPR dan BPRP dengan bagian ASDM dan bagian akuntansi

h. Membuat laporan cicilan rumah dinas

i. Bekerja sama dan saling membantu antar pegawai serta berkoordinasi dengan bidang terkait.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan sebagai pemegang kuasa ketenagalistrikan. Bidang usahan pertama PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat umum,

industriawan, dan pebisnis di samping membentuk atau memperoleh atas laba. Berdasarkan peraturan pemerintah no.17 tanggal 28 mei 1990 pasal 6, lapangan usaha PLN adalah sebagai berikut :

> “Dengan mengindahkan prinsip ekonomi da terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten menyediakan tenaga listrik meliputi kegiatan pembangkitan, tranmisi dan pembayaran tenaga listrik.”

PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten mempunyai tiga sasaran dalam mengusahakan tenaga listrik, yaitu :

1. Meningkatkan jumlah pelanggan.
2. Meningkatkan daya terpasang.
3. Meningkatkan jumlah penjualan KWH (satuan tenaga listrik).

PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten dalam melaksanakan aktivitasnya, mempunyai beberapa kegiatan operasional yang terdiri dari :

1. Pelayanan pada pelanggan, diantaranya :
    a. Permintaan sambungan dan penambahan daya.
    b. Permintaan ganti nama atau tarif.
    c. Permintaan atau pengembangan sambungan rumah.
    d. Permintaan penerangan sementara.

2. Pemeliharaan rutin terhadap gardu, jaringan sambungan rumah, gedung, dan kabel-kabel.
3. Pembacaan meter, mlaksanakan pencatatan, standmeter atas pemakaian tenaga listrik.
4. Pembuatan rekening listrik atas pemaki tenaga listrik.
5. Pembukuan tenaga listrik.
6. Penerimaan dan peluansan pembayaran rekening listrik.
7. Pengawasan tunggakan rekening listrik dan tindak lanjut.

PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten selain memberikan pelayanan yang baik, serta tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik, masih ada pelayananan lain yang diberikan kepada konsumen yaitu perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik yang disalurkan, penambahan daya jangka pendek serta sambungan antara lain : pasar malan dan keperluan lainnya.

Kedudukan PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten merupakan unsur pelaksanaan dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen pertambangan dan energi. Tugas pokok PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten yaitu fungsi pendistribusian dan pengusahaan ketenagalistrikan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh menteri serta berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pendistribusian yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
2. Pengoperasian dan pemeliharaan system pendistribusian tenaga listrik.
3. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan.
4. Pengelolaan sumber daya manusia.
5. Pengawasan pelaksanaan distribusi.

Kantor distribusi Jawa Barat dan banten merupakan kantor induk yang membawahi unit pelaksana sebagai berikut :

1. Area pelayanan dan jaringan Cirebon
2. Area pelayanan dan jaringan Tasikmalaya
3. Area pelayanan dan jaringan Garut
4. Area pelayanan dan jaringan Cianjur
5. Area pelayanan dan jaringan Sukabumi
6. Area pelayanan dan jaringan Bogor
7. Area pelayanan dan jaringan Banten
8. Area pelayanan dan jaringan Purwakarta
9. Area pelayanan dan jaringan Cimahi
10. Area pelayanan dan jaringan Bandung

11. Area pelayanan dan jaringan Majalaya
12. Area pelayanan dan jaringan Bekasi
13. Area pelayanan dan jaringan Depok
14. Area pelayanan dan jaringan Sumedang
15. Area pelayanan dan jaringan Karawang
16. Area pengatur distribusi Bandung

Produk yang dihasilakan dan dijual oleh PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten adalah energy listrik yang bisa dipergunakan untuk menjalankan mesin dan penerangan. PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten dalam menjual produknya, melainkan ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan presiden (KEPRES). Harga jual tenaga listrik untuk tahun 2003 ditetapkan melalui KEPRES no. 89 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang tariff dasar Listrik (TDL) 2003 yang mulai diberlakukaan tanggal 1 januari 2003.

Berdasarkan peruntukannya maka TDL 2003 terbagi dalam 8 golongan tarif yaitu :

1. Tarif S, untuk kepentingan social.
2. Tarif R, untuk kepentingan rumah tangga.
3. Tarif B, untuk kepentingan Bisnis.
4. Tarif I, untuk kepentingan Industri.
5. Tarif P, untuk kepentingan kantor pemerintah dan penerangan jalan.

6. Tarif M, untuk kepentingan multi guna
7. Tarif T, untuk kepentingan Traksi / kereta Listrik.
8. Tarif C, untuk kepentingan khusus

PT.PLN (Persero)Distribusi jawa Barat dan Banten say ini bertahap tengah menggambarkan Inovasi Produk layanan Pelanggan, diantaranya mengembangkan teknologi CIS (customer Information system) dan GIS (geographical information system).